

Sosialisasi Pemetaan Arah Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli

Socialization Mapping the Direction of Government Policy in Development Village Owned Business Enterprises in the District Dampal Selatan Regency Tolitoli

Slamet Riadi

Moh. Royfandi *

Gita Farista

Suci Dwi Vany

Wulandari

Department of Public Administration, Social and Political Sciences, Faculty of Tadulako University

email: mohroyfandi788@gmail.com

Kata Kunci

Pemetaan Kebijakan
BUMDes
Sosialisasi

Keywords:

Policy Mapping
BUMDes
Socialization

Received: September 2024

Accepted: October 2024

Published: January 2025

Abstrak

Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan sosialisasi berkaitan dengan pemetaan arah kebijakan Pemerintah dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024 dengan model FGD (Focus Group Discussion) dan bertempat di kantor Kecamatan Dampal Selatan dengan melibatkan 13 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Dampal Selatan. Adapun peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah Kepala Desa, Ketua BUMDes, Ketua BPD, dan 2 orang masyarakat masing-masing perwakilan Desa. Hasil sosialisasi ini adalah para peserta tidak mengetahui apa yang menjadi pertanyaan di atas dengan rata-rata persentase 36,25%, sedangkan 21% lainnya mengetahui apa yang telah ditanyakan dalam assessment. Pada tahap kedua assessment menunjukkan peningkatan pemahaman peserta rata-rata sudah mengetahui atas apa yang menjadi pertanyaan di atas dengan presentasi 48,8% dan 5,5% yang masih menjawab belum mengetahui apa yang telah disampaikan dalam materi dari 50 orang peserta aktif.

Abstract

The purpose of this activity is to carry out outreach related to mapping the direction of Government policy in the development of Village-Owned Enterprises in South Dampal District, Tolitoli Regency. This socialization activity was carried out on July 29 2024 using the FGD (Focus Group Discussion) model and took place at the South Dampal District office involving 13 villages in the South Dampal District area. The participants who participated in this activity were the Village Head, the Head of BUMDes, the Head of the BPD, and 2 community members each representing the Village. The result of this socialization was that the participants did not know what the questions above were with an average percentage of 36.25%, while the other 21% knew what had been asked in the assessment. In the second stage of the assessment, participants showed an increase in understanding, on average they already knew what the questions above were with a presentation of 48.8% and 5.5% still answered that they did not know what had been presented in the material out of 50 active participants.



© 2025 Slamet Riadi, Moh. Royfandi, Gita Farista, Suci Dwi Vany, Wulandari. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i1.8216>

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Desa, menjelaskan bahwa Desa merupakan organisasi Pemerintahan yang terdepan serta terdekat dengan warganya Sehingga dalam menentukan kemajuan pembangunan baik infrastruktur maupun ekonomi secara nasional ditentukan oleh Desa (Laru & Suprojo, 2019a). Sebab mustahil sebuah negara bisa maju jika desanya tidak maju pula (Pradani, n.d.). Pada dasarnya pembangunan di sebuah negara bertujuan untuk membentuk kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Maulidiah, 2015). Menurut Burban (1987) pembangunan nasional diilustrasikan sebagai tombak, dimana desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan (Wahyudi, 2016).

How to cite: Riadi, S., Rofyandi, M., Farista, G., Vany, S, D., & Wulandari. (2025). Sosialisasi Pemetaan Arah Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(1), 46-55. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i1.8216>

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, maka desa menjadi sarana atau alat untuk menjangkau sasaran riil untuk mensejahterakan masyarakat dengan membentuk badan hukum yang berbasis usaha yang disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Bambang, 2017). Pemerintah Indonesia mulai menyadari bahwa pembangunan dilakukan di kawasan pedesaan memberikan dampak positif dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata (Lengo, 2021). Hal ini sesuai dengan Nawacita dan Nawa Kerja dari Pemerintah (Maulidiah, 2015). Oleh karena itu, pemerintah telah menetapkan satu kebijakan dimana desa harus membentuk satu badan hukum yang dapat mengelola desanya yang disebut BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), melalui 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa Bidang Pemerintahan Desa; 6. Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa; 7. Peraturan Bupati tentang Penjabaran atas Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa; 8. Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa; 9. Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) (Darwita & Redana, 2018).

Pendirian BUMDes sendiri sudah ada sejak lama, namun hanya ada beberapa daerah yang telah melaksanakannya (Wahyudi, 2016). UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengatur bagaimana mekanisme pendirian, pengelolaan serta manfaat BUMDes di setiap Desa (Ramadana, 2013). Bahkan untuk memperkuat posisi BUMDes, Pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 telah mengeluarkan regulasi tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang merupakan derivasi dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Sumitriani & Adiputra, 2020). Dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes (Robbani, 2022). Berbagai regulasi yang mengatur pembentukan serta pengelolaan BUMDes di setiap Desa, menunjukkan bahwa BUMDes diberikan kewenangan seluas-luasnya untuk mengelola aset dan potensi Desa guna mendongkrak perekonomian Desa melalui usaha-usaha masyarakat (Budiono, 2015). Hal ini sesuai dengan Permendagri Nomor 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Bambang, 2017). Serta memberikan spirit dan mendorong Desa bertransformasi sebagai entitas yang bertenaga baik sosial, politik, berdaulat, berbudaya, berdaya secara ekonomi dan bermartabat (Titioka *et al.*, 2020).

Di Indonesia BUMDes telah dijalankan kurang lebih 9 tahun, akan tetapi perkembangannya belum memperlihatkan hasil – hasil yang sesuai dengan harapan. Fenomena hari ini menunjukkan bahwa banyak Pemerintah Desa tidak memanfaatkan kewenangan yang diberikan (Sumitriani & Adiputra, 2020). Berdasarkan data per Juni 2021 terdapat 83.381 Desa, sedangkan BUMDes terdapat 12.945 per Maret 2023, dan ada sekitar 35.000 BUMDes dalam proses registrasi. Artinya ada sekitar 42% Desa belum memiliki BUMDes (Suhu1 *et al.*, 2020). Ini sejalan dengan penyampain Presiden Jokowi Widodo pada tahun 2019, mengatakan bahwa ada 2.188 BUMDes tidak beroperasi dan 1.670 telah beroperasi namun tidak berkontribusi terhadap pembangunan Desa (Sumitriani & Adiputra, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Denok Kurniasih (Kurniasari, 2017). menyimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes tidak mencapai tujuan yang telah ditentukan. Rendahnya kualitas dalam menjalankan program-program BUMDes disebabkan karena kesiapan sumber daya manusia dan anggaran yang tidak tepat. Kebanyakan orang-orang yang ditempatkan dalam kepengurusan BUMDes dinilai tidak tepat dalam mengelola dan mengembangkan BUMDes itu sendiri. Dampaknya menjalankan program-program BUMDes tidak dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab. Para pengurus BUMDes tidak mampu menciptakan sebuah inovasi atau menciptakan keberagaman, yang ada adalah dalam menyusun program bersifat sementara dan ikut-ikutan dengan program BUMDes di Desa tetangga.

Uraian masalah di atas sejalan dengan hasil penelitian (Bambang, 2017) menyimpulkan bahwa BUMDes di Kecamatan Kaligondang memiliki potensial yang dapat dikelola sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Namun dalam

perjalanannya BUMDes di Kecamatan Kaligondang secara umum mengalami hambatan dalam berbagai aspek. 1. Kelembagaan, 2. Fasilitas, 3. SDM, 4. Manajemen, dan terakhir Finansial. Berbagai fenomena yang terjadi, telah memperlihatkan bahwa Pemerintah Desa di kagetkan dan belum siap menerima keberadaan BUMDes sebagai mitra dalam rangka melakukan pembangunan pada bidang ekonomi.

Beragam uraian masalah di atas, menggambarkan fenomena yang sama terjadi di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli diantaranya 1. 13 Desa di wilayah Kecamatan Dampal Selatan semuanya telah memiliki BUMDes yang didirikan sejak tahun 2018 lalu. Pendirian Badan Usaha Milik Desa ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam bidang ekonomi, namun sejak dibentuknya BUMDes sampai sekarang, hanya ada 1 BUMDes yang aktif. Kesiapan SDM merupakan penyebab BUMDes di wilayah Kecamatan Dampal Selatan tidak dijalankan secara maksimal. Ini disebabkan karena penempatan SDM dilakukan oleh Pemerintah Desa tidak tepat. Pengrekrutan yang dilakukan tidak berbasis keahlian, kesesuaian bidang ilmu, yang ada adalah Pengrekrutan dilakukan berdasarkan kedekatan, kekeluargaan, 2. Hal lain adalah kesiapan sumber daya keuangan atau sumber pemasukan dan pengelolaan keuangan yang tidak tepat, dari 13 Desa yang ada di Kecamatan Dampal Selatan mengalami hal yang sama dalam hal pendanaan. BUMDes di 13 Desa tidak mendapatkan suplai anggaran baik dari pemerintah desa maupun pemerintah daerah, hal ini dikarenakan buruknya pengelolaan keuangan antara penyiapan modal dan keuntungan yang tidak sesuai, 3. Penetapan program-program yang kurang produktif dan bersifat sementara. Di Kabupaten Tolitoli rata-rata BUMDes dalam menyusun program-program kerja hanya bersifat sementara dan kurang produktif. Misal, penyewaan tenda terowongan yang dianggap mampu menjalankan program-program BUMDes tidak mampu mengembalikan modal yang disiapkan dan tidak mampu mengaktifkan BUMDes tersebut dalam jangka panjang. Selain itu, membuat usaha jual beli barang, membuka jenis usaha simpan pinjam, dan keduanya dijalankan tidak maksimal dan berdampak pada bangkrutnya BUMDes tersebut.

METODE

1. Bentuk Kegiatan

Berdasarkan fenomena diatas, maka perlu dilakukan suatu pengkajian kembali dalam rangka mengevaluasi kerja-kerja BUMDes dengan melakukan sosialisasi atau FGD (Focus Group Discussion) mengenai "Pemetaan Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli". Metode sosialisasi ini dianggap lebih efektif karena melibatkan secara langsung orang-orang yang mempunyai peran dalam pengembangan BUMDes. Untuk mengukur kesuksesan atau sebagai evaluasi kegiatan ini, kami mengedarkan kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi dilakukan.

2. Teknis Pelaksanaan

a. Perencanaan

Pada tahapan ini, tim melakukan pertemuan/rapat bersama anggota tim lainnya untuk membahas agenda pengabdian yang akan dilakukan. Mulai dari jadwal pemberangkatan, kesiapan alat-alat yang digunakan, serta metode komunikasi kemitraan dalam kegiatan pengabdian ini. Setelah proses ini dilalui dan tim menyepakati hasil rapat tadi, maka tim menghubungi pihak mitra untuk menyampaikan jadwal kami dan tentunya akan menyesuaikan dengan kesediaan mereka. Untuk memaksimalkan kehadiran peserta kegiatan, kami meminta kepada Pemerintah Kecamatan untuk menyurat ke pihak-pihak yang menjadi peserta, 4 hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

b. Tindakan

Setelah tahapan perencanaan matang, maka tim akan mengimplementasikan kegiatan pengabdian yang sudah melalui proses perencanaan sebelumnya. Kegiatan Sosialisasi atau FGD (Focus Group Discussion) ini dilakukan di Kantor Camat Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli selama 1 hari dengan tema "Pemetaan Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli". Dengan melibatkan 4 orang perwakilan setiap Desa dari 13 Desa ada, diantaranya Kepala Desa, Ketua

BPD, Ketua BUMDes, dan 1 orang Masyarakat. Tim pengabdian ini mengundang mereka agar bisa saling mengetahui apa saja yang menjadi duduk permasalahan pada pengelolaan BUMDes di Desanya masing-masing serta memberikan solusi atau membuka wawasan mereka melalui kegiatan tersebut.

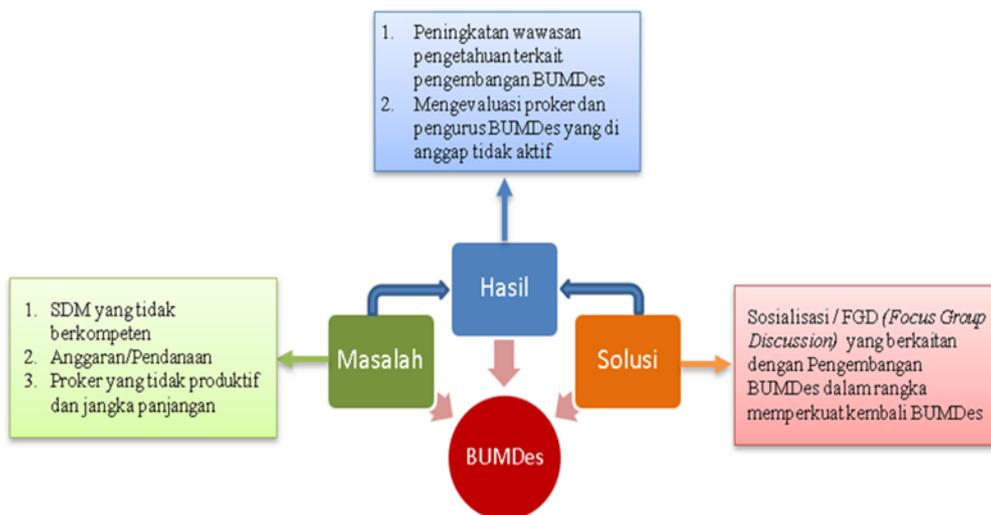
c. Evaluasi

Pada tahapan evaluasi ini penting dilakukan untuk mengetahui seberapa sejauh serapan pemahaman peserta dalam menerima materi yang disampaikan. Selain itu, evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat keterlibatan peserta dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai materi yang disampaikan oleh narasumber. Kegiatan pengabdian ini-pun tim telah mengedarkan kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi dengan mengajukan 5 pertanyaan yang tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengkonfirmasi sejauh mana pemahaman peserta dalam menerima materi. Kuesioner ini juga sebagai bahan untuk pengolahan data dengan menghitung hasil persentase kuesioner yang telah diedarkan baik sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan, dengan begitu tim dapat menarik satu kesimpulan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya baik yang dilakukan oleh tim yang sama maupun kegiatan yang dilakukan oleh tim lain.

Selain kuesioner, tahap akhir dari kegiatan pengabdian ini adalah adanya proses MONEV yang dilakukan secara internal oleh institusi Universitas Tadulako dengan menugaskan orang-orang yang telah di tunjuk sebagai reviwer. Hal in dilakukan guna mengevaluasi hasil kegiatan secara keseluruhan yang dilakukan oleh tim pengabdian tersebut, sehingga dapat di pertanggungjawabkan baik secara keuangan maupun secara administrasi.

d. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Adapun pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini yang berkaitan dengan Pemetaan Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli dengan model kegiatan sosialisasi atau FGD (Focus Group Discussion) dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024 mulai pukul 9.00 sampai 16.00 WIT di Kantor Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan PKM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Dampal Selatan merupakan salah satu daerah maju dan merupakan daerah produksi di Kabupaten Tolitoli, dari segi Sumber Daya Alam, Dampal Selatan memiliki lahan pertanian masyarakat seperti kelapa, kakao, padi, durian dll. Wilayah ini memiliki 13 Desa yang terdiri dari Desa Bangkir, Dongko, Mimbala, Simuntu, Lempe, Soni, Tampiala, Abbajareng, Kombo, Puse, Lemba Harapan, Palla Kawe, Padumpu. Desa tersebut juga telah memiliki BUMDes yang didirikan sejak tahun 2018 secara bersamaan. Sebagai wilayah produksi di Kabupaten Tolitoli, maka kehadiran BUMDes

menjadi spirit baru bagi Pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan perekonomian Desa dengan pemanfaatan potensi serta aset yang dimiliki Desa (Raharjo *et al.*, 2024). Namun harapan ini tidak terwujud, dampaknya adalah pengembangan BUMDes tidak dapat diteruskan. Oleh karenanya, kegiatan sosialisasi penting dilakukan, guna membuka wawasan pengetahuan bagi peserta sebagai orang yang mempunyai peranan dan kewenangan dalam pengembangan BUMDes di Desa masing-masing sekaligus mengukur suksesnya kegiatan pengabdian ini. Berikut hasil kuesioner yang telah dibagikan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan.

Tabel I. Hasil Survei Peningkatan Pemahaman Dari 50 Peserta Aktif Saat Sosialisasi

No	Pertanyaan	Sebelum		Sesudah	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah bapak/ibu mengetahui adanya organisasi berbadan hukum bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa anda	50	0	50	0
2	Apakah bapak/ibu mengetahui fungsi, tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa anda	17	33	42	8
3	Apakah bapak/ibu mengetahui bagaimana cara mengelola BUMDes agar tetap produktif	11	39	47	3
4	Apakah bapak/ibu mengetahui penyebab BUMDes tidak aktif di desa anda	11	39	50	0
5	Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa potensi desa dapat dijadikan sebagai program kerja BUMDes itu sendiri	16	34	50	0
Rat-rata		21%	36,25%	48,8%	5,5%

Berdasarkan hasil assessment diatas, menunjukkan bahwa tingkat pemahaman peserta sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan berkaitan dengan Pemetaan Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli menjawab tidak mengetahui apa yang menjadi pertanyaan di atas dengan rata-rata persentase 36,25% , sedangkan 21% lainnya mengetahui apa yang telah di tanyakan dalam assessment dari 50 orang peserta aktif. Dari hasil diatas menunjukkan perbedaan tingkat pengetahuan peserta dalam mengelola, mengembangkan BUMDes di Kecamatan Dampal Selatan sangat signifikan. Sehingga mempengaruhi proses pengelolaan BUMDes, dampaknya menjadikan BUMDes macet, mati suri atau tidak aktif. Pentingnya perencanaan sumber daya manusia dalam mengelola dan mengembangkan sebuah organisasi agar menjadikan organisasi dapat menghadapi keadaan tidak sesuai yang diharapkan (Aula *et al.*, 2022).

Selanjutnya hasil assessment saat sesudah kegiatan dilakukan yang menunjukan bahwa peserta rata-rata sudah mengetahui atas apa yang menjadi pertanyaan di atas dengan presentasi 48,8% dan 5,5 % yang masih menjawab belum mengetahui apa yang telah disampaikan dalam materi. Ini menunjukkan bahwa ada perubahan pola pikir peserta dari sebelumnya belum mengetahui dalam pengembangan BUMDes menjadi telah membuka wawasan pengetahuan para peserta.

Dengan begitu, pemerintah dan pengurus BUMDes bisa mengetahui titik kelemahan pada pengelolaan BUMDes sehingga dapat melakukan mengevaluasi dan perbaikan-perbaikan dalam organisasi BUMDes.



Gambar 2. PPT yang disampaikan pada saat presentasi kegiatan sosialisasi.



Gambar 3. Dokumentasi pada saat kegiatan sosialisasi.

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes di 13 Desa yang ada di Kecamatan Dampal Selatan belum dijalankan secara serius. Bagaimana tidak, beragam masalah yang di hadapi Pemerintah Desa dan BUMDes dalam menjalankan Fungsi BUMDes, diantaranya ialah kesulitan dalam menentukan roadmap. Roadmap dapat di bagi dalam beberapa prespektif, seperti roadmap dalam konteks penelitian, roadmap dalam konteks program pemerintahan, dan roadmap dalam dunia bisnis (Nuryanti, 2019). Karena BUMDes merupakan organisasi bersifat bisnis maka roadmap yang dapat digunakan dalam dunia bisnis adalah mengembangkan produk, menentukan strategi penjualan, dan mengorganisir perusahaan, hal tersebut adalah bagian dari peran-peran manajemen. BUMDes memerlukan suatu manajemen bisnis. Menurut Senjani, 2019 ada 5 komponen dalam manajemen bisnis. 1, manajemen keuangan. 2, manajemen pemasaran. 3, manajemen produksi. 4, manajemen distribusi. Dan terakhir 5, manajemen sumber daya manusia. (Rubiyanto & Putri, 2020). Dalam konteks pengelolaan BUMDes, pengembangan produk yang dimaksudnya adalah memanfaatkan semua potensi-potensi yang dimiliki desa. Seperti mengelola produk yang dihasilkan oleh masyarakat, seperti kripik pisang, hasil-hasil pertanian, dan kerajinan tangan lainnya. Jika semua produk telah dikelola, maka tahap selanjutnya adalah penentuan strategis penjualan, salah satu cara yang paling tepat adalah produk yang dihasilkan lalu dipasarkan baik pasar tradisional maupun modern. Selain itu, membangun kemitraan dengan perusahaan yang bergerak dalam dunia bisnis guna menyalurkan produk-produk yang dihasilkan masyarakat tersebut.

Namun demikian, berdasar fakta lapangan, 13 Desa dan BUMDes di wilayah Kecamatan Dampal Selatan setelah terbentuk justru mangkrak atau mati suri karena tidak mempunyai rencana usaha dan program-program yang jelas. Selain itu, pembentukan BUMDes di wilayah ini dilakukan secara asal-asalan dan sekedar mengikuti tran yang ada serta kebingungan bergerak dan ingin memulai darimana. Hal ini tercuat dalam sosialisasi yang dilakukan di Kantor Camat Dampal Selatan. Hal ini terjadi karena sejak pendirian dan pembentukannya tidak di barengi dengan pelatihan, sosialisasi atau sejenisnya sebagai bekal bagi Pemerintah Desa, pengurus BUMDes dan Masyarakat dalam mengelola BUMDes di 13 Desa yang ada. Padahal pengembangan sumber daya manusia sangat penting dilakukan guna memberikan peningkatan pengetahuan bagi orang-orang yang mempunyai peran penting dalam menjalankan organisasi atau badan tersebut (Putra *et al.*, 2023). Dengan memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, maka BUMDes dapat mengelola ekonomi lokal secara optimal dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki Desa (Azhari *et al.*, 2023). Penentuan sumber daya manusia memiliki pengaruh dalam pengembangan BUMDes di setiap Desa (Laru & Suprojo, 2019b). Keberhasilan BUMDes dalam menjalankan program-programnya tergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki (Fatimah, 2021). Sumber daya manusia yang memadai akan mampu mengelola usaha menjadi efisien, inovatif serta produktif, utamanya dalam menghadapi perubahan dan keinginan pasar (Nursetiawan, 2018). Sebaliknya jika penyiapan sumber daya manusia yang tidak tepat, maka keberhasilan sebuah BUMDes cenderung mengalami kegagalan (Nardin, 2019). Dampaknya adalah BUMDes tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra dalam pembangunan Desa.

Permasalahan BUMDes tidak hanya terletak pada sumber daya manusia saja, akan tetapi pengelolaan keuangan BUMDes pun munai beragam masalah. Ketidak mampuan sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola dan mendistribusikan keuangan BUMDes terhadap program-program yang sudah di tetapkan serta ketidak mampuan menilai hasil perolahan

kerja keuangan BUMDes dalam satu periode. Selanjutnya Ketidak konsistenan para pengurus BUMDes dalam mengembangkan anggaran yang telah di berikan baik dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Daerah. Seperti diketahui bahwa sumber anggaran yang di peroleh BUMDes berasal dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Trisnawati *et al.*, 2022). Namun untuk di wilayah Kecamatan Dampal Selatan BUMDes lebih sering menerima dana penyataaraan dari Pemerintah Daerah. Adapun besaran yang diterima BUMDes sebanyak 50 juta per-tahunnya. Harapannya adalah anggaran tersebut dikelola dengan baik, sehingga modal yang telah diberikan dapat di kembangkan berkali-kali lipat, dengan begitu BUMDes tidak hanya menerima dana penyataaraan dari Pemerintah Daerah namun juga BUMDes mempunyai sumber lain yang lebih mandiri dan produktif.

Hal lain adalah dalam penetapan program-program kerja BUMDes dalam satu periode cenderung kurang produktif, jangka pendek, dan tidak sesuai keinginan pasar. Berdasarkan pengabdian yang dilakukan oleh tim, menemukan fenome yang sangat sederhana namun berdampak signifikan terhadap pengembangan BUMDes tersebut. Program-program yang telah di sepakati adalah seperti pengadaan jasa terowongan, pembentukan usaha dagang, usaha simpan pinjam. Berdasarkan hasil pengabdian, ketiga program ini dilakukan oleh 13 Desa dan dilakukan secara bersama-sama. Seperti penyediaan terowongan bertujuan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang punya acara hajatan, pesta, atau kedukaan, dengan harga sewa mencai 2 sampai 3 juta saja. Program tersebut belum mampu membawa keberhasilan BUMDes di Desa tersebut, karena Desa lain pun memiliki program yang sama, sedangkan konsumen dalam menggunakan jasa tersebut sangatlah kurang. Sehingga penyewaan terowongan lebih banyak markir kebangding berproduksi. Selanjutnya program usaha dagang, program usaha ini dibentuk secara bersama-sama oleh BUMDes di 13 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli. Namun, setelah beberapa bulan berjalan, usaha dangang ini semakin sulit bertahan dan dikembangkan, karena modal yang ada telah dihabiskan tanpa dilengkapi dengan administrasi yang jelas. Dampaknya adalah, usaha dagang tersebut kehabisan modal dan kehabisan keuntungan sehingga usaha tersebut mengalami kemacetan. Yang paling banyak dilakukan pengurus BUMDes di wilayah Kabupaten Tolitoli termasuk Kecamatan Dampal Selatan adalah melakukan usaha simpan pinjam. Usaha ini merupakan jenis usaha perpinjaman uang terhadap anggota BUMDes, masyarakat dan kelompok-kelompok yang memerlukan dana. Dana yang telah di pinjam akan mendapatkan bunga sebesar 5 % dari anggaran yang dipinjamkan. Dalam prosesnya, usaha ini tidak sesuai perencanaan awal yang mana hasil dari usaha simpan pinjam ini di kembangkan dan di kelola dengan baik oleh BUMDes. Namun yang terjadi adalah program simpan pinjam mengalami kredit macet, dimana orang-orang yang telah meminjam dana melalui BUMDes tidak lancar mengembalikan modal tersebut. Padahal jika masyarakat yang meminjam dana tersebut dan mengembalikan modal dengan lancar maka program usaha simpan pinjam ini dapat mempertahankan eksistensi BUMDes yang ada (Mardiana *et al.*, 2024).

Pengembangan BUMDes sebenarnya muda dilakukan. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap Desa (Widiastuti *et al.*, 2019). Seperti pada aspek pertanian, hasil-hasil pertanian dapat dimanfaatkan oleh BUMDes dengan membeli dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi (M. Zulkarnaen, 2017). Kecamatan Dampal Selatan di kenal dengan kekayaan sumber daya alamnya di bidang pertanian seperti, kelapa, cengkeh, kakau, padi, durian, dan lain-lain. Sedangkan aspek pariwisata, kecamatan Dampal Selatan daerah yang mempunyai pesisir pantai yang indah, mempunyai air terjun di pegunungan, mempunyai air panas juga di pegunungan dan lain-lain. Dari semua potensi yang dimiliki, BUMDes dapat mengelolanya agar menambah penghasilan bagi BUMDes itu sendiri (Laru & Suprojo, 2019). Melihat fenomena diatas, tim pengabdian masyarakat Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako melakukan sosialisasi berkaitan dengan Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan BUMDes di Kecamatan Dampal Selatan. Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk memberikan penguatan dan pemahaman bagi Pemerintah Desa, Pengurus BUMDes, dan Masyarakat untuk menentukan kebijakan guna meningkatkan pengelolaan BUMDes di Kecamatan Dampal Selatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1 di atas yang mana menunjukkan bahwa rata-rata peserta menjawab ya dari 5 pertanyaan dalam kuesioner. Artinya kegiatan ini menunjukkan hasil yang baik setelah sosialisasi dilakukan berdasarkan persentase assessment diatas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil sosialisasi yang dilakukan bahwa ada 3 hal yang mendasar yang menyebabkan BUMDes tidak mampu menjalankan peran dan fungsinya sebagai mitra pembangunan di Desa. 1. Kemampuan SDM yang tidak memadai. Orang-orang yang dijadikan pengurus tidak mempunyai kompetensi yang baik dalam mengelola organisasi dan keuangan, tidak mampu menciptakan inovasi dalam menyusun program-program kerja dalam jangka panjang, 2. Ketidakmampuan pengurus BUMDes dalam mengelola keuangan untuk menjadi pemasukan BUMDes itu sendiri, yang ada adalah, para pengurus BUMDes hanya bisa menghabiskan Modal yang telah diberikan pemerintah daerah maupun dana penyetaraan dari pemerintah desa, 3. Penyusunan dan penetapan proker hanya bersifat sementara dan kurang produktif. Padahal pemanfaatan SDA bisa dilakukan sebagai program-program BUMDes itu sendiri. Oleh karena itu, melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan dapat membuka wawasan pengetahuan pengurus BUMDes, Pemerintah Desa dalam mengembangkan BUMDes di wilayah Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Universitas Tadulako yang telah memberikan dana dipa dalam rangka terlaksananya kegiatan pengabdian yang telah terprogram setiap tahunnya. Begitu Pula dengan anggota tim pengabdian ini yang turut berkontribusi dalam menyukseskan kegiatan ini, serta tak lupa kepada mitra yaitu Pemerintah Kecamatan yang memfasilitasi terlaksananya kegiatan ini di kecamatan dampal selatan serta semua peserta yang terlibat .

REFERENSI

- Aula, S., Hanoum, S., & Prihananto, P. (2022). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Resiliensi Organisasi: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Sains dan Seni ITS*, **11**(1), Article 1. <https://doi.org/10.12962/j23373520.v11i1.67483>
- Azhari, A., Mustofa, M., Meisari, E. D., & Anggarista, E. T. S. (2023). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Kualitas Sumber Daya Manusia; BUMDes; Strategi Pengembangan Usaha. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, **14**(2), Article 2. <https://doi.org/10.36982/jjegmk.v14i2.3392>
- Bambang, B. (2017). Pemetaan arah kebijakan pengembangan badan usaha milik desa di Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, **4**(2), 181–206.
- Budiono, P. (2015). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor). *Jurnal Politik Muda*, **4**(1), 116–125.
- Darwita, I. K., & Redana, D. N. (2018). Peranan badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, **9**(1), 51–60.
- Fatimah, A. S. (2021). Pengembangan Kapasitas Pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Cilumba Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya. *JAK PUBLIK (Jurnal Administrasi & Kebijakan Publik)*, **2**(1). <http://administrasiku.com/index.php/jakp/article/view/58>
- Kurniasari, N. (2017). Strategi penanganan krisis kepariwisataan dalam kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Mediator: Jurnal Komunikasi*, **10**(2), 177–189.
- Laru, F. H. U., & Suprojo, A. (2019a). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, **8**(4), 367–371.

- Laru, F. H. U., & Suprojo, A. (2019b). Peran pemerintah desa dalam pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, *8*(4), 367–371.
- Lengo, B. A. (2021). Implementasi Kebijakan Pendirian Bumdes Di Desa Wolotolo, Kabupaten Ende. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, *8*(5), 902–913.
- M. Zulkarnaen, R. (2017). Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Dharmakarya*, *5*(1). <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v5i1.11430>
- Mardiana, M., Kasim, F. S., Hanapi, H., Fiansi, F., Rifai, R. T. G., Nuzulul, R. C., Sulistina, S., Nasruddin, N., & Muliadi, M. (2024). Sosialisasi Tentang Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Labuan Lobo, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah. *Jurnal Cendekia Mengabdikan Berinovasi dan Berkarya*, *2*(2), Article 2. <https://doi.org/10.56630/jenaka.v2i2.634>
- Maulidiah, S. (2015). Dinamika Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia (Studi Efisiensi, Partisan dan Non Partisan). *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, *1*(2), Article 2.
- Nardin, Y. (2019). Kebijakan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat pada program bumdes. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, *8*(3), 140–145.
- Nursetiawan, I. (2018). Strategi pengembangan desa mandiri melalui inovasi bumdes. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, *4*(2), 72–81.
- Nuryanti, I. (2019). Strategi pengembangan badan usaha milik desa (bumdes) kasus di bumdes mitra sejahtera desa cibunut kecamatan argapura kabupaten majalengka. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, *3*(2), 348–359.
- Pradani, R. F. E. (n.d.). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Juornal of Economics and Policy Studies*. Retrieved August 12, 2024, from <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/jesk/article/view/3429>
- Putra, R. S., Safitri, O., & Ma'ruf, M. (2023). Analisis pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Karangrejo Ngasem Kediri. *Indonesia Berdaya*, *4*(4), 1687–1692. <https://doi.org/10.47679/ib.2023627>
- Raharjo, K. M., Sucipto, S., Ishom, M., & Fatihin, M. K. (2024). Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes dalam Mengembangkan Produk Unggulan Desa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, *4*(1), Article 1. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.2000>
- Ramadana, C. B. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Journal:eArticle, Brawijaya University*. <https://www.neliti.com/publications/75712/>
- Robbani, N. (2022). Problematika Bumdes Putra Harapan Di Desa Manding Laok Kecamatan Manding. Skripsi, Universitas Wiraraja Madura. <https://repository.wiraraja.ac.id/2502/>
- Rubiyanto, R., & Putri, A. R. (2020). Pelatihan dan Pendampingan Pencatatan, Pelaporan Keuangan BUMDES Berbasis Akuntansi Sederhana di Desa Pungging Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto. *ABDIMAS NUSANTARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1), 260–269.
- Suhu1, B. L., Djae2, R. M., & Sosoda3, A. (2020). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Geti Baru Kecamatan Bacan Barat Utara Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Government of Archipelago - JGOA*, *1*(1), Article 1. <https://doi.org/10.52046/jgoa.v1i1.360>
- Sumitariani, N. K., & Adiputra, I. M. P. (2020). Faktor-faktor Penentu Keberhasilan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana BUMDes. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, *8*(2), Article 2. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v8i2.26877>

- Titioka, B. M., Huliselan, M., Sanduan, A., Ralahallo, F. N., & Siahainenia, A. J. D. (2020). Pengelolaan Keuangan Bumdes di Kabupaten Kepulauan Aru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.31959/jpmj.v3i1.481>
- Trisnawati, N. L. D. E., Trisnadewi, N. K. A., Sanjaya, N. M. W. S., & Kasih, N. L. S. (2022). Memaksimalkan Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. *Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ)*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.37385/ceej.v3i3.1370>
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Upaya Pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.02.1>
- Widiastuti, H., Kresnawati, E., & Utami, E. R. (2019). Pemetaan Potensi Desa dalam Rangka Mewujudkan Bumdes Di Kecamatan Moyudan. *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.18196/bdr.7151>
- Bayata, A. (2019). Review on Nutritional Value of Cassava for Use as a Staple Food. *Science Journal of Analytical Chemistry*, 7(4), 83-91. <https://doi.org/10.11648/j.sjac.20190704.12>